

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan sebutan sebagai Negara seribu pulau, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki pulau sejumlah 13.266 pulau yang tersebar di sekitar sabang sampai merauke. Pulau-pulau tersebut di kelilingi oleh perairan yang luasnya 2/3 dari luas daratan. Pulau terbesar di Indonesia adalah pulau Kalimantan dengan luas 539.460 km² di susul oleh Sumatera dan Papua. Dilihat dari jumlah penduduk di Indonesia memiliki lebih dari 250 juta jiwa yang tersebar dipedesaan dan diperkotaan Indonesia menjadi Negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke empat yang ada di dunia.

Pertumbuhan ekonomi tinggi merupakan *trade-off* pemerataan pendapatan untuk mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan harus ditangani secara simultan yaitu menjadi bagian yang terintegrasi, supaya dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang dan juga akan meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan (Mallo, 2011). Pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan merupakan permasalahan yang bertentangan, adapun pembangunan ekonomi yang berpengaruh negatif seperti kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan pengangguran harus diselesaikan dengan skema pembangunan. Skema pembangunan yang merupakan terdiri dari rumusan – rumusan kebijakan yang harus mencakup semua elemen, termasuk penduduk miskin agar ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi. Keikutsertaan penduduk miskin

yaitu untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, antara lain melalui pendidikan, akses informasi ,dan kesehatan.

Banyaknya jumlah penduduk tersebut, menjadikan Indonesia sebagai Negara yang kompleks dengan permasalahan terutama permasalahan mengenai pendidikan, Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi. Terjadi pada tahun 2010 tumbuh sebesar 6.1% dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 6.2, Kemudian tiga tahun berikutnya mengalami perlambatan tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5%. Perlambatan ekonomi Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor dalam negeri maupun luar negeri yang berupa, faktor guncangan ekonomi internasional yang berdampak pada perekonomian di Indonesia

Permasalahan yang dialami Indonesia pertama dari tingkat pendidikan, yaitu dengan tingkat jumlah penduduk buta huruf yang masih tinggi, sehingga masih banyak penduduk yang belum bisa membaca. Dan untuk mengurangi tingkat buta huruf yang tinggi di Indonesia, pemerintah melalui dinas pendidikan yang berada di tingkat daerah melakukan penyuluhan dan melakukan pelatihan keterampilan membaca. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Permasalahan yang kedua yang dialami oleh masyarakat yaitu dalam bidang perekonomian, terutama kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut pemerintah berupaya dalam melakukan berbagai kebijakan, diantaranya, dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai melalui kementerian sosial. Bantuan ini diberikan oleh pemerintah kepada

masyarakat yang berstatus dibawah garis kemiskinan dan masyarakat yang rentang kemiskinan.

Perekonomian adalah perkembangan yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian. Kemiskinan merupakan masalah krusial yang di alami seluruh negara, dari zaman dahulu hingga sampai saat ini. kemiskinan harus mendapat perhatian bagi semua kalangan. pengentasan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab mereka yang miskin, akan tetapi tanggungjawab pemerintah. Meskipun pengentasan kemiskinan sudah dimulai sejak lama oleh semua negara termasuk Organisasi Dunia, namun hingga saat ini tetap saja tidak tertuntaskan dan belum menemui pemecahannya. (Maipita, 2014).

Pemerintah dan organisasi bekerja sama dengan regional – multilateral seperti OECD, G20, the World Bank, ADB, IMF, dan ASEAN, dalam menangani masalah sosial yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (*income inequality*) perlu adanya perhatian khusus. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yakni melalui sistem keuangan inklusif (*financial inclusion*). Sehingga dalam forum Leaders Summit, 2012 organisasi G20 mengeluarkan *Financial Peer Learning Program (FPLP)* dan *Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI)* untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya inklusi keuangan (*financial inclusion*) yaitu akses layanan keuangan formal seperti kredit, tabungan, fasilitas pembiayaan dan beberapa produk lainnya akan sangat membantu kelompok marjinal yang berpendapatan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kalangan menengah kebawah.

Untuk dapat mensenergiskan kebijakan yang dikeluarkan oleh forum *Leaders Summit* 2012 yang memiliki tujuan dalam perluasan akses kuangan formal kepada

seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam mengakses sistem keuangan formal. Dengan adanya strategi tersebut yakni diharapkan menjadi strategi dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah struktural, dalam pengentasan kemiskinan pun harus secara sistematis, komprehensif dan institusional. Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan. Lembaga Keuangan Mikro (*Micro Financial /Mirco Credit*) adalah lembaga yang telah terbukti efektif mengatasi kemiskinan di semua negara berkembang termasuk Indonesia. Contoh keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan lembaga keuangan mikro ini adalah yang telah dipelopori oleh seorang profesor Muhammad Yunus dengan gerakan Grameen Bank. Grameen Bank adalah organisasi yang memberikan kredit mikro yang di mulai di Bangladesh, yang memberikan pinjaman kepada penduduk miskin tanpa adanya jaminan terhadap pinjaman yang diberikan, pada kredit grameen bank berbeda dengan kredit lainnya pada grameen bank memberikan pinjaman kepada kelompok perempuan yang produktif yang masih berada dalam status sosial miskin (Wahid,2014).

Strategi Nasional Keuangan Inklusif yaitu strategi keuangan inklusif di jabarkan dalam 6 pilar yang meliputi edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan / peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen (Bank Indonesia, 2014). Kebijakan pemerintah Bank Indonesia yang dikemukakan dalam 6 pilar menjadi faktor utama sebagai penunjang akses keuangan inklusif, salah satu hal yang penting dalam 6 pilar yaitu mengenai informasi dan kebijakan yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Karena tanpa adanya suatu pemetaan informasi

yang baik maka masyarakat akan sulit mengerti akan sistem keuangan inklusi yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya & Nursechafia (2016). Menjelaskan mengenai inklusi dan pertumbuhan keuangan yang ada di Indonesia, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang ada di Indonesia di pengaruhi oleh kurangnya ketersediaan akses bagi masyarakat miskin pada umumnya sangat terbatas. Sedangkan dari segi penggunaan jasa keuangan juga mempengaruhi terhadap inklusi keuangan, akan tetapi memiliki proporsi sangat kecil. Program inklusi telah dikukan oleh setiap negara yang ada di Indonesia karena program ini dianggap sebagai suatu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat miskin agar dapat meningkatkan pembangunan serta meningkatkan stabilitas keuangan dengan sebaiknya.

Pada dasarnya Inklusi Keuangan merupakan akses pelayanan keuangan yang bertujuan untuk membantu meratakan akses keuangan dan memberikan pelayanan akses keuangan yang baik kepada masyarakat miskin agar dapat menggunakan akses keuangan secara formal. Melalui penyaluran kredit kepada msyarakat akan membantu kualitas hidup masyarakat miskin. Sistem kredit yang diberikan oleh pemerintah yang berupa modal, akan sangat membantu bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Perekonomian akan mengalami perkembangan jika masyarakat yang ada di dalam sejahtera darisegi perekonomian.

Inklusi keuangan merupakan suatu gambaran kepada pemerintah terkait dengan permasalahan yang tengah dialami oleh masyarakat miskin. Karena sulitnya mendapatkan akses keuangan secara tepat yang disebabkan oleh adanya hambatan dalam memperoleh akses pelayanan keuangan. Dengan demikian perlu

adanya suatu kebijakan dari pemerintah yang akan merubah perekonomian menjadi lebih baik.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sistem inklusi keuangan merupakan salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul mengenai **“PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketersediaan jasa keuangan di Indonesia terutama bagi masyarakat miskin?
2. Bagaimana dampak akses kredit terhadap kemiskinan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketersediaan jasa keuangan di Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin.
2. Untuk mengetahui dampak akses kredit terhadap kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan kepada peniliti yang berkenaan inklusi keuangan.

b. Manfaat bagi masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat prasejahtera atau masyarakat menengah kebawah tentang akses keuangan formal dan ketersediaan pelayanan dan jasa lembaga keuangan formal.

c. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai refrensi bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan masing - masing bab saling berkesenambungan diantaranya, bab satu dan bab selanjutnya, Yang disesuaikan dengan format penulisan pada sistematika pada materi pembahasan yang diteliti. Secara umum isi pembahasan pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab satu membahas mengenai latar belakang permasalahan yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar baik secara teoritis maupun fakta yang mempengaruhi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, rumusan masalah yang memerlukan pemecahan dan jawaban melalui penelitian yang dilakukan serta tentang tujuan yang akan diperoleh oleh peneliti, juga manfaat penelitian yang ditujukan kepada pembaca peneliti.

BAB II : LANDASAN TEORI PENELITIAN

Bab dua adalah uraian tentang landasan teori yang berupa teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang diajukan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Pada bab dua ini juga menjabarkan mengenai penelitian terdahulu atau penelitian yang sebelumnya dan model analisis yang digunakan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab tiga peneliti menguraikan tentang pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini, jenis dan sumber data, identifikasi variabel – variabel, definisi operasional variabel, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis yang akan digunakan pada saat penelitian dan untuk mengetahui teknik model analisis data yang akan di gunakan.

BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN

Pada bab empat akan dibahas secara rinci data - data yang digunakan dalam penelitian, pembahasan mengenai analisa disertai dengan perhitungan dan pembuktiannya. Pada bagian ini juga akan menjawab permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi berdasarkan hasil perhitungan dan landasan teori yang relevan.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab lima akan dijelaskan mengenai simpulan - simpulan uraian pembahasan serta saran mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan juga diharapkan bermanfaat pada peneliti - peneliti selanjutnya.